

## **ANALISIS PENGARUH DANA ABADI PENDIDIKAN TERHADAP KUALITAS PENDIDIKAN DAN KUALITAS SDM DI INDONESIA**

**Rizal Aldrina Ramadhan dan Yulistria Anggraini**

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Indonesia  
[rizalaldrina@kemenkeu.go.id](mailto:rizalaldrina@kemenkeu.go.id), [yulistria.anggraini@kemenkeu.go.id](mailto:yulistria.anggraini@kemenkeu.go.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keefektifan pengelolaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia, serta mengidentifikasi program-program yang perlu diperbaiki untuk lebih memberikan manfaat. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan Dana Abadi di Bidang Pendidikan sejak 2010 dengan tujuan menciptakan dana yang dapat memberikan manfaat antargenerasi melalui investasi jangka panjang. Dana Abadi ini mencakup Dana Abadi Pendidikan, Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Perguruan Tinggi, dan Dana Abadi Kebudayaan, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM di Indonesia. Meskipun telah ada alokasi dana yang signifikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara alokasi Dana Abadi dengan peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah yang tercermin dalam indeks PISA, QS World Ranking, dan IPM Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis data dari Laporan Keuangan LPDP, hasil PISA, QS World Ranking, dan IPM, serta jumlah publikasi jurnal yang terindeks Scopus. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam kualitas pendidikan tinggi, pengaruh Dana Abadi terhadap kualitas pendidikan dasar dan menengah masih terbatas. Oleh karena itu, disarankan untuk memperluas cakupan program Dana Abadi agar mencakup pendidikan dasar dan menengah serta meningkatkan kualitas riset yang relevan dengan kebutuhan Indonesia.

**Kata Kunci:** Dana Abadi Pendidikan, Kualitas Pendidikan, Sumber Daya Manusia, IPM, PISA, QS World Ranking, Pengelolaan Dana

### **Abstract**

*This study aims to analyze the effectiveness of the management of the Endowment Fund in the Education Sector to improve the quality of education and Human Resources (HR) in Indonesia, as well as identify programs that need to be improved to provide more benefits. The Government of Indonesia has allocated an Endowment Fund in the Education Sector since 2010 with the aim of creating a fund that can provide intergenerational benefits through long-term investment. This endowment fund includes the Education Endowment Fund, Research Endowment Fund, Higher Education Endowment Fund, and Cultural Endowment Fund, which is expected to improve the quality of education and human resources in Indonesia. Although there has been a significant allocation of funds, the results of the study show that there is still a gap between the allocation of the Endowment Fund and the improvement of the quality of primary and secondary education which is reflected in the PISA index, QS World Ranking, and Indonesian HDI. This study uses a quantitative approach with a descriptive method to analyze data from LPDP Financial Statements, PISA results, QS World Ranking, and HDI, as well as the number of journal publications indexed by Scopus. The results of the analysis show that despite the improvement in the quality of higher education, the influence of the Endowment Fund on the quality of primary and secondary education is still limited. Therefore, it is recommended to expand the scope of the Endowment Fund program to include primary and secondary education and improve the quality of research relevant to Indonesia's needs.*

**Keywords:** Education Endowment Fund, Education Quality, Human Resources, IPM, PISA, QS World Ranking, Fund Management

## PENDAHULUAN

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tercantum salah satu tujuan negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa (An Nisaa' Budi Sulistyaningrum et al., 2022; Aziizu, 2015; Ode & Marajohan Tambun, 2022; Triningsih, 2017). Sebagai bagian dari tujuan negara dalam amanat Pembukaan UUD Tahun 1945 tersebut, Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pemerintahan di bidang pendidikan. Setiap warga negara berhak atas pendidikan dan negara wajib untuk mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa (Awulle, 2020; Fakhrol et al., 2023; Hairani, 2018; Wulan & Sasmita, 2022).

Penyelenggaraan pendidikan terutama untuk penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, tidak akan terlepas salah satunya dari kebutuhan anggaran untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai dengan amanat UUD 1945, Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 telah menetapkan mandatory spending pendidikan sebesar minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Adjie Hari Setiawan, 2023; Cahyadi, 2020; Daria, 2022; Irawati & Susetyo, 2017; Khunaifi & Matlani, 2019; Thalib & Haris, 2023; Wartoyo, 2022). Dari jumlah belanja dalam APBN yang mencapai ribuan triliun, sebanyak 20 persen diperuntukkan untuk anggaran di bidang pendidikan. Nilai Mandatory Spending Pendidikan ini tentunya fluktuatif setiap tahunnya sesuai dengan jumlah belanja pada APBN di tahun tersebut.

Seiring dengan perkembangan pelaksanaan anggaran, Pemerintah Indonesia mulai mendesain alokasi Mandatory Spending Pendidikan untuk program yang tidak harus dihabiskan pada satu tahun anggaran atau dengan kata lain dikumpulkan dari sebagian alokasi Mandatory Spending Pendidikan setiap tahunnya dalam sebuah dana yang disebut dengan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang sekarang lebih dikenal dengan Dana Abadi Pendidikan. DPPN atau Dana Abadi Pendidikan ini ditujukan untuk menciptakan dana yang bermanfaat antargenerasi atau Intergenerational Fund dan bersifat sustainable (Hadiyanto et al., 2022; "Menakar Keefektifan Mandatory Spending Bidang Pendidikan," 2022).

Melansir situs Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), pemerintah mulai menyisihkan alokasi dana pendidikan untuk DPPN atau Dana Abadi Pendidikan sejak Tahun 2010 melalui UU Nomor 2 Tahun 2010 tentang APBN-P 2010. Undang-undang yang sama juga menetapkan bentuk dana kelolaan tersebut berupa Endowment Fund (dana abadi). Pada awalnya DPPN ini dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah melalui KMK Nomor 490 Tahun 2010, namun pada tahun 2011 melalui PMK Nomor 252/PMK.01/2011 dibentuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai lembaga di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas untuk mengelola DPPN atau Dana Abadi Pendidikan ini. Dana Abadi Pendidikan pertama yang dikelola LPDP adalah sebesar satu triliun rupiah. Jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya dan terakumulasi hingga Rp139,1 triliun pada tahun 2023. Adanya Dana Abadi Pendidikan ini tentunya diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas Pendidikan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia sebagaimana komitmen Pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia di Indonesia.

Meskipun sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pentingnya alokasi dana untuk pendidikan dan riset di Indonesia, masih ada kekurangan dalam pemahaman terkait

keefektifan pengelolaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Penelitian yang ada lebih banyak menyoroti pengelolaan anggaran pendidikan secara umum, namun belum secara spesifik menganalisis pengelolaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan, serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan dan daya saing SDM Indonesia di tingkat global. Terlebih lagi, meskipun Dana Abadi Pendidikan telah ada sejak 2010, evaluasi menyeluruh mengenai hasil dan pencapaian dana tersebut masih terbatas. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan menilai efektivitas pengelolaan dana tersebut, serta mengidentifikasi program-program yang dapat ditingkatkan untuk memberikan dampak lebih besar terhadap kualitas pendidikan dan SDM Indonesia.

Sejak tahun 2019 Pemerintah tidak hanya mengalokasikan DPPN dalam APBN tetapi juga mulai mengalokasikan Dana Abadi Penelitian yang ditujukan untuk mendukung pengembangan riset di Indonesia serta membiayai kebutuhan penelitian demi meningkatkan daya saing Indonesia. Berdasarkan Nota Keuangan Tahun 2020 pemanfaatan DPPN atau Dana Abadi Pendidikan dan Dana Abadi Penelitian adalah untuk mendukung peningkatan akses masyarakat terutama masyarakat miskin pada jenjang pendidikan tinggi, dan peningkatan kualitas riset. Peningkatan kualitas SDM terutama masyarakat miskin pada jenjang pendidikan tinggi diharapkan akan melahirkan pemimpin dan profesional di berbagai bidang. Peningkatan dan pengembangan kualitas riset Indonesia akan memberikan kontribusi bagi pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kemudian pada tahun 2020 Pemerintah juga memberikan dukungan lain berupa Dana Abadi Kebudayaan dan Dana Abadi Perguruan Tinggi. Dalam Nota Keuangan Tahun 2020, Dana Abadi Kebudayaan ditujukan untuk menjamin keberlangsungan upaya pemajuan kebudayaan bagi generasi berikutnya yang meliputi peningkatan kapasitas SDM kebudayaan dan lembaga kebudayaan. Sedangkan alokasi Dana Abadi Perguruan Tinggi ditujukan untuk mewujudkan universitas-universitas berkelas dunia (*World class university*) yang diharapkan mampu mendorong mahasiswa untuk bersaing dalam ranah global yang memang dipersiapkan secara matang untuk menghadapi tantangan globalisasi. Ke empat dana abadi ini kemudian disebut dengan Dana Abadi di Bidang Pendidikan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2021.

Jumlah Dana Abadi di Bidang Pendidikan yang telah terakumulasi hingga lebih dari Rp139,1 triliun pada tahun 2023 tentunya sangat diharapkan untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas SDM di Indonesia yang antara lain dapat tercermin dari tingkat Programme for International Student Assessment (PISA) untuk melihat kualitas pendidikan sekolah dasar dan menengah, peringkat QS World Ranking untuk kualitas Perguruan Tinggi, Indeks Pembangunan Manusia untuk kualitas SDM, serta jumlah publikasi jurnal yang terindeks Scopus untuk kualitas penelitian di Indonesia. Berdasarkan hasil PISA tahun 2022 yang dirilis pada 5 Desember 2023, pelajar Indonesia memperoleh skor kemampuan membaca sebesar 359 poin masih jauh di bawah skor rata-rata negara anggota OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) sebesar 476 poin, skor kemampuan matematika sebesar 366 poin juga masih di bawah rata-rata sebesar 472 poin, dan skor kemampuan science sebesar 383 poin yang juga masih di bawah skor rata-rata sebesar 485 poin. Skor yang diperoleh Indonesia ini masih lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura yang sudah memperoleh skor di atas

rata-rata negara OECD baik dalam kemampuan membaca, matematika, maupun science. Sedangkan berdasarkan hasil QS World Ranking Tahun 2024, beberapa universitas terbaik di Indonesia seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut Teknologi Bandung (ITB) masih berada pada peringkat 300 besar di dunia masih sangat rendah apalagi jika dibandingkan dengan National University of Singapore (NUS) di peringkat 11 dunia dan Nanyang technological University (NTU) Singapura di peringkat 19 dunia. Tentu PISA dan QS World Ranking ini harus menjadi salah satu cermin bagi Pemerintah terkait dengan kualitas pendidikan Indonesia baik pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi.

Selain itu, berdasarkan data BPS Tahun 2023 Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2023 adalah sebesar 74,39. Nilai ini meningkat jika dibandingkan dengan IPM pada tahun 2022 sebesar 73,77. Peningkatan IPM tahun 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Peningkatan IPM ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup dan tingkat perkembangan pembangunan manusia dalam jangka Panjang. Dengan pencapaian tersebut, status pembangunan Indonesia berada pada kategori tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ ). Pada hal yang lain, berdasarkan data dari Scimago Journal & Country Rank Indonesia menempati peringkat 19 dari 233 negara dengan 58.224 jurnal yang terindeks Scopus pada tahun 2023. Hal ini dapat dinilai baik karena Indonesia berada pada peringkat yang cukup tinggi dari 234 negara tersebut. Namun pada tahun 2022 jumlah jurnal yang terindeks Scopus sempat turun jauh jika dibandingkan dengan jurnal yang terindeks Scopus pada tahun 2021 dan 2023. Penurunan di tahun 2022 ini merupakan penurunan pertama dalam 5 tahun terakhir. Hal ini tentu menjadi indikator yang patut diperhatikan Pemerintah berkaitan dengan kualitas penelitian di Indonesia.

Indikator atau penilaian yang telah disebutkan di atas menjadi beberapa cerminan kualitas pendidikan dan kualitas SDM di Indonesia. Peringkat atau penilaian yang ada mengindikasikan posisi pendidikan dan SDM di Indonesia dalam ranah global. Indikator yang belum sesuai harapan tentunya perlu menjadi perhatian Pemerintah. Peningkatan Dana Abadi di Bidang Pendidikan setiap tahun tentunya diharapkan seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas SDM di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan analisis untuk melihat pengelolaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan agar dapat menentukan langkah yang dapat ditempuh Pemerintah untuk memaksimalkan pengelolaan dana tersebut sehingga diperoleh kualitas pendidikan dan kualitas SDM Indonesia yang mampu bersaing di tingkat dunia.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, kajian ini disusun untuk menganalisis keefektifan pengelolaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan terhadap peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kualitas SDM di Indonesia dan mengidentifikasi program-program yang dapat dilakukan Pemerintah untuk lebih memberikan manfaat atas pengelolaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan. Analisis ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan tentang pengelolaan keuangan negara, khususnya terkait pengelolaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis efektivitas pengelolaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan terhadap

peningkatan kualitas pendidikan dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan untuk menggambarkan dan menganalisis data terkait alokasi dana, realisasi PNBP, dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan dan SDM secara sistematis.

1. **Populasi dan Sampel** Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data yang terkait dengan Dana Abadi di Bidang Pendidikan, termasuk dana yang dialokasikan untuk Pendidikan, Penelitian, Perguruan Tinggi, dan Kebudayaan sejak 2010 hingga 2023. Sampel penelitian mencakup data tahunan alokasi dan realisasi Dana Abadi di Bidang Pendidikan serta data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PISA, dan QS World Ranking.
2. **Jenis Data** Penelitian ini menggunakan dua jenis data:
  - a. **Data Primer:** Data primer diperoleh dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang mencakup informasi alokasi, investasi, dan realisasi PNBP.
  - b. **Data Sekunder:** Data sekunder mencakup data IPM, hasil PISA, dan peringkat universitas Indonesia dalam QS World Ranking, yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), OECD, dan QS.
3. **Teknik Pengumpulan Data** Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yang mencakup pengumpulan laporan tahunan dari LPDP, data hasil survei PISA, data QS World Ranking, dan laporan IPM dari BPS. Selain itu, data terkait jumlah publikasi jurnal yang terindeks Scopus juga diambil untuk menganalisis pengaruh Dana Abadi Penelitian terhadap kuantitas dan kualitas riset.
4. **Analisis Data** Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis regresi untuk mengidentifikasi hubungan antara pengelolaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan dengan kualitas pendidikan, SDM, dan riset di Indonesia. Analisis ini juga akan membandingkan hasil-hasil yang dicapai (seperti IPM, PISA, QS World Ranking, dan jumlah jurnal terindeks Scopus) dengan realisasi PNBP yang dihasilkan dari investasi Dana Abadi.
5. **Indikator Keberhasilan** Indikator keberhasilan penelitian ini adalah:
  - a. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, terutama dalam dimensi pengetahuan (HLS dan RLS).
  - b. Peningkatan kualitas pendidikan yang tercermin dari peringkat Indonesia dalam survei PISA dan QS World Ranking universitas.
  - c. Peningkatan jumlah dan kualitas publikasi riset Indonesia yang terindeks di Scopus.
6. **Model Analisis** Penelitian ini akan menggunakan model analisis regresi untuk menguji hubungan antara variabel bebas (Dana Abadi di Bidang Pendidikan) dengan variabel terikat (IPM, hasil PISA, dan jumlah publikasi terindeks Scopus). Model ini akan membantu menentukan pengaruh pengelolaan Dana Abadi terhadap kualitas pendidikan dan riset di Indonesia.
7. **Validitas dan Reliabilitas** Validitas data diperoleh melalui pengecekan sumber data yang kredibel seperti LPDP, BPS, dan OECD. Selain itu, untuk menguji reliabilitas, penelitian ini menggunakan data yang bersifat konsisten dan valid yang sudah diterbitkan dalam laporan tahunan resmi serta sumber yang diakui internasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Realisasi Dana Abadi di Bidang Pendidikan

Dana Abadi di Bidang Pendidikan direalisasikan dalam bentuk Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya. Nilai realisasi tersebut fluktuatif setiap tahun sesuai dengan kondisi keuangan di tahun tersebut. Pada tahun 2023, Pemerintah mengalokasikan Dana Abadi di Bidang Pendidikan sebesar Rp20 triliun dan telah direalisasikan hingga Dana Abadi di Bidang Pendidikan terakumulasi menjadi Rp139,1 triliun dari sebelumnya Rp119,1 triliun pada tahun 2022. Pada tahun 2024, Pemerintah juga telah mengalokasikan Dana Abadi di Bidang Pendidikan sebesar Rp25 triliun yang terdiri atas Dana Abadi Pendidikan sebesar Rp15 triliun, Dana Abadi Penelitian sebesar Rp4 triliun, Dana Abadi Perguruan Tinggi sebesar Rp4 triliun dan Dana Abadi Kebudayaan sebesar Rp2 triliun. Realisasi tiap-tiap Dana Abadi di Bidang Pendidikan hingga tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

gambaran fluktuatifnya nilai realisasi Dana Abadi di Bidang Pendidikan terutama Dana Abadi Pendidikan setiap tahun. Realisasi Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Perguruan Tinggi, dan Dana Abadi Kebudayaan dimulai pada tahun 2020 dan tidak mendapatkan alokasi pada tahun 2022. Secara akumulasi jumlah Dana Abadi di Bidang Pendidikan Per Jenis Dana dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1. Akumulasi Dana Abadi di Bidang Pendidikan Per Jenis Dana**

Uraian	Nilai Akumulasi
Dana Abadi Pendidikan	111.117.700.000.000
Dana Abadi Penelitian	12.990.000.000.000
Dana Abadi Perguruan Tinggi	10.000.000.000.000
Dana Abadi Kebudayaan	5.000.000.000.000
<b>Total</b>	<b>139.107.700.000.000</b>

*Sumber: Laporan Keuangan LPDP Tahun 2023*

Akumulasi Dana Abadi terbesar terdapat pada Dana Abadi Pendidikan sesuai dengan awal terbentuknya Dana Abadi di Bidang Pendidikan yang hanya terdiri atas Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) atau sekarang dikenal dengan Dana Abadi Pendidikan. Nilai akumulasi Dana Abadi di Bidang Pendidikan ini cukup besar hingga mencapai ratusan triliun. Dana inilah yang kemudian disimpan sebagai Dana Abadi untuk diinvestasikan menjadi sumber pendanaan untuk membiayai Program Layanan dan operasional LPDP. Sesuai dengan proses bisnis penggunaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan, dana sebesar Rp139,1 triliun tersebut diinvestasikan ke dalam instrumen-instrumen investasi dengan tingkat risiko yang terkendali, baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Investasi setiap jenis Dana Abadi dipisahkan ke dalam portofolio masing-masing. Klasifikasi investasi atas Dana Abadi di Bidang Pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. Klasifikasi Investasi Tiap Jenis Dana Abadi di Bidang Pendidikan**

Klasifikasi	Instrumen	Jumlah	Jenis Dana
<b>Investasi Jangka Pendek</b>			
<b>Setara Kas dan</b>	Deposito	29.167.538.682.181	Dana Abadi Pendidikan
<b>Investasi Jangka</b>		2.554.920.675.450	Dana Abadi Penelitian
<b>Pendek</b>		1.549.492.616.781	Dana Abadi Perguruan Tinggi
		1.020.448.255.293	Dana Abadi Kebudayaan

<b>Total Investasi Jangka Pendek</b>		<b>34.292.400.229.705</b>	
<b>Investasi Jangka Panjang</b>			
<b>Dimiliki Hingga Jatuh Tempo</b>	Surat Utang	83.170.797.057.257	Dana Abadi Pendidikan
	Negara	10.291.445.547.899	Dana Abadi Penelitian
		8.324.117.278.388	Dana Abadi Perguruan Tinggi
		3.862.123.838.698	Dana Abadi Kebudayaan
	Obligasi	81.913.732.509	Dana Abadi Pendidikan
	Korporasi	7.148.336.651	Dana Abadi Penelitian
		4.332.504.831	Dana Abadi Perguruan Tinggi
		2.855.426.009	Dana Abadi Kebudayaan
<b>Total Investasi Jangka Panjang</b>		<b>105.744.733.722.242</b>	
<b>Total Portofolio Investasi LPDP</b>		<b>140.037.133.951.947</b>	

Sumber: Laporan Keuangan LPDP Tahun 2023

Nilai pada tabel di atas merupakan nilai bruto Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada LPDP. Terdapat Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya sebesar Rp896,1 miliar sehingga nilai netto dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada LPDP adalah sebesar Rp139,1 triliun. Sesuai dengan komitmen untuk mendukung peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia di Indonesia, Pemerintah telah merealisasikan Dana Abadi di Bidang Pendidikan sesuai dengan alokasi yang telah disiapkan dan dianggarkan pada tahun tersebut.

Investasi-investasi yang dilakukan oleh LPDP ini telah menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang setiap tahunnya digunakan untuk membiayai Program Layanan dan operasional LPDP. Pada tahun 2023 LPDP membukukan PNBP sebesar Rp9,33 triliun yang terdiri atas PNBP dari Dana Abadi Pendidikan sebesar Rp7,54 triliun, PNBP dari Dana Abadi Penelitian sebesar Rp811,58 miliar, PNBP dari Dana Abadi Perguruan Tinggi sebesar Rp641,50 miliar, PNBP dari Dana Abadi Kebudayaan sebesar Rp303,10 miliar, dan PNBP Non-Dana Abadi sebesar Rp34,96 miliar. Rincian PNBP yang diterima LPDP pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

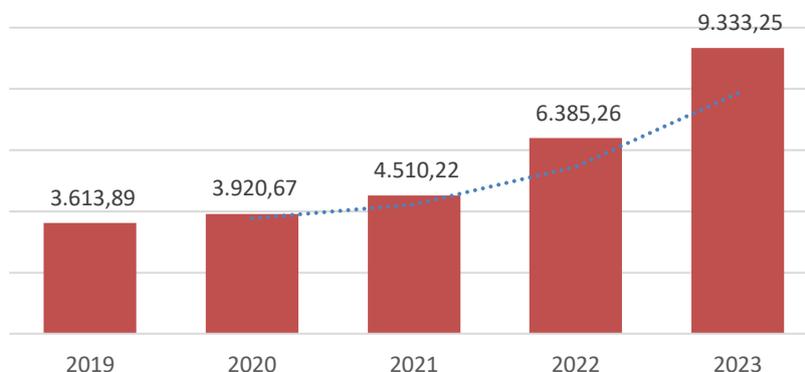
**Tabel 3. Rincian PNBP Tiap Jenis Dana Abadi di Bidang Pendidikan**

No	Uraian	Realisasi PNBP
1.	<b>Dana Abadi Pendidikan</b>	<b>7.542.112.514.043</b>
	Deposito	2.424.855.895.284
	Obligasi Negara	4.935.576.138.631
	Obligasi Korporasi	143.986.532.000
	Giro	3.532.300.834
	Lain-lain	34.161.647.293
2.	<b>Dana Abadi Penelitian</b>	<b>811.581.323.142</b>
	Deposito	226.557.769.797
	Obligasi Negara	576.647.670.698
	Obligasi Korporasi	8.300.162.667
	Lain-lain	75.719.980
3.	<b>Dana Abadi Perguruan Tinggi</b>	<b>641.497.878.280</b>
	Deposito	130.021.611.777
	Obligasi Negara	493.601.285.951
	Obligasi Korporasi	8.083.106.667
	Lain-lain	9.791.873.886

4.	<b>Dana Abadi Kebudayaan</b>	<b>303.104.678.200</b>
	Deposito	81.311.168.267
	Obligasi Negara	213.184.352.615
	Obligasi Korporasi	7.970.498.667
	Lain-lain	638.658.651
5.	<b>Non-Dana Abadi</b>	<b>34.956.518.392</b>
	Hibah	34.955.687.424
	<b>Total</b>	<b>9.333.252.912.056</b>

Sumber: Laporan Keuangan LPDP Tahun 2023

Jumlah PNBPN yang diterima LPDP setiap tahun cenderung mengalami peningkatan sesuai dengan peningkatan jumlah investasi yang dilakukan. Kemungkinan ke depannya jumlah PNBPN yang diterima LPDP masih akan meningkat seiring dan bergantung pada realisasi atas alokasi Dana Abadi di Bidang Pendidikan. PNBPN yang diterima LPDP lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 4. PNBPN LPDP Tahun 2018 – 2023 (Rp Miliar)

Sumber: Laporan Keuangan LPDP Tahun 2023

Realisasi PNBPN pada LPDP telah digunakan untuk membiayai Program Layanan dan Operasionalnya dalam bentuk belanja. Rincian output atas belanja yang telah dicapai LPDP pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Capaian Output LPDP Tahun 2023

Rincian Output	Jumlah
<b>Program Layanan</b>	<b>9.716.406.966.608</b>
Pendanaan untuk Penyaluran Beasiswa	8.863.641.520.142
Beasiswa Native LPDP	4.361.244.061.178
Beasiswa Kolaboratif Kemendikbudristek	4.122.607.356.980
Beasiswa Kolaboratif Kemenag	379.790.101.984
Pendanaan untuk Penyaluran Dana Riset	349.698.702.720
Riset LPDP	91.829.375.031
Program Kemendikbudristek	139.461.053.794
Program BRIN	118.408.273.895
Pendanaan untuk Penyaluran Dana Abadi Kebudayaan	44.755.743.746
Pendanaan untuk Penyaluran Dana Abadi Perguruan Tinggi	458.311.000.000
<b>Kegiatan Operasional</b>	<b>128.856.704.517</b>
Layanan Perkantoran	99.037.906.790
Dukungan Manajemen	15.487.026.861
Kerumahtanggaan	11.174.348.510

Pengembangan SDM	3.597.889.357
Rekomendasi Kepatuhan Internal	714.788.994
Belanja Modal	7.880.116.869
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	351.032.600
Gedung/Bangunan	3.548.035.740
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	3.981.048.529
Pengelolaan Dana	6.451.653.997
<b>Total</b>	<b>9.845.263.671.127</b>

Sumber: Laporan Keuangan LPDP Tahun 2023

Dari data di atas, realisasi belanja paling besar adalah pada output pendanaan beasiswa yang merupakan output utama dari LPDP. Pendanaan beasiswa tersebut terdiri dari pendanaan beasiswa *native* LPDP, beasiswa kolaborasi dengan Kemendikbudristek, beasiswa kolaborasi dengan Kemenag, dan beasiswa kolaborasi dengan Kementerian teknis lain. Pendanaan beasiswa ini telah membiayai puluhan ribu penerima beasiswa baik yang sudah menjadi alumni maupun yang sedang dan akan mendapatkan beasiswa. Dalam Laporan Keuangan LPDP Tahun 2023 disebutkan bahwa berdasarkan statistik penerima beasiswa dari tahun 2014 s.d. 2023, LPDP telah mendanai secara berkesinambungan mahasiswa pascasarjana bagi masyarakat Indonesia antara lain masyarakat umum (reguler), ASN, TNI, dan POLRI. Selain itu, Beasiswa Afirmasi LPDP telah meningkatkan inklusivitas pendidikan pascasarjana khususnya untuk keluarga prasejahtera, beasiswa Indonesia Timur, daerah 3T, dan penyandang disabilitas. Berdasarkan statistik penerima beasiswa afirmasi dari tahun 2014 s.d. 2023 memperlihatkan bahwa LPDP telah mendanai secara berkesinambungan mahasiswa pascasarjana sebanyak 8.569 orang. Dari seluruh penerima tersebut telah mewakili 34 provinsi di Indonesia, termasuk provinsi yang tergolong miskin dan tertinggal. Perkembangan penerima beasiswa Tahun 2014 s.d. 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5. Perkembangan Penerima Beasiswa Tahun 2014 s.d. 2023**

Jenis Beasiswa	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
<i>Full Scholarship</i>	2.66	4.38	6.52	1.91	1.67	4.50	278	4.24	5.64	9.96	42.83
Afirmasi	5	6	0	0	9	0	-	9	7	4	2
BPRI	672	949	1.174	502	483	1.828	-	1.405	1.530	2.513	11.082
<i>Targeted</i>	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109
Umum	-	-	2.168	353	701	1.602	232	1.109	1.503	3.961	11.629
<b>Partial Scholarship</b>	1.884	3.437	3.178	1.055	495	1.070	46	1.735	2.614	3.490	20.012
<b>Total</b>	<b>2.19</b>	<b>2.65</b>	<b>6.85</b>	<b>2.61</b>	<b>1.10</b>	<b>1.71</b>	<b>4.02</b>	<b>1.17</b>	<b>1.17</b>	<b>-</b>	<b>2.668</b>
<b>Total</b>	<b>2.884</b>	<b>4.651</b>	<b>7.205</b>	<b>2.171</b>	<b>1.789</b>	<b>4.671</b>	<b>680</b>	<b>4.266</b>	<b>5.664</b>	<b>9.964</b>	<b>45.500</b>

Sumber: Laporan Keuangan LPDP Tahun 2023

Dari banyaknya jumlah penerima beasiswa dari LPDP yang telah mewakili 34 provinsi di Indonesia baik untuk menjalani perkuliahan di Luar Negeri maupun Dalam Negeri, tentu sangat diharapkan akan membawa dampak positif bagi Indonesia, baik dari segi kualitas pendidikan maupun kualitas SDM di Indonesia. Jumlah 45.500 merupakan jumlah yang cukup banyak dan menyebar pada berbagai sektor dan bidang karir.

Selain itu, LPDP juga merealisasikan belanja dalam bentuk pendanaan untuk riset, program kebudayaan, dan Perguruan Tinggi. Layanan pendanaan riset LPDP terdiri atas

Riset Kompetisi, Riset Mandatori, Riset Invitasi, dan Kolaborasi Internasional. Termasuk ke dalam Riset Mandatori adalah riset-riset kolaborasi dengan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dan Kemendikbudristek. Secara akumulatif berdasarkan Laporan Keuangan LPDP Tahun 2023 terdapat 1.853 proyek riset yang masih berstatus *on-going* dengan nilai pendanaan hingga Rp1,86 triliun. Sedangkan proyek riset berstatus selesai sebanyak 938 proyek dengan nilai pendanaan pendanaan hingga Rp794 miliar, sehingga realisasi pendanaan riset yang telah dilaksanakan oleh LPDP dari tahun 2020 hingga tahun 2023 telah mencapai Rp2,66 triliun dengan 2.791 proyek. Pendanaan riset LPDP meliputi berbagai riset komersial dan implementatif yang dapat memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat.

Sedangkan realisasi layanan pendanaan untuk Perguruan Tinggi dalam bentuk insentif kepada PTN-BH dalam rangka pengembangan *World Class University* juga telah direalisasikan dengan jumlah realisasi dan Perguruan Tinggi penerimanya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 6. Realisasi Layanan Dana Abadi Perguruan Tinggi Tahun 2023**

<b>Nama PTN BH</b>	<b>Nilai</b>
Universitas Andalas	10,3
Universitas Brawijaya	11,13
Institut Pertanian Bogor	48,26
Universitas Negeri Padang	7,84
Universitas Gadjah Mada	49,69
Universitas Pendidikan Indonesia	10,89
Universitas Diponegoro	25,86
Institut Teknologi Bandung	50,16
Institut Teknologi Sepuluh November	17,86
Universitas Sebelas Maret	8,56
Universitas Sumatera Utara	44,55
Universitas Indonesia	32,37
Universitas Hasanuddin	8,66
Universitas Padjajaran	15,71
Universitas Negeri Malang	7,81
Universitas Airlangga	82,65
Universitas Syah Kuala	10,06
Universitas Negeri Semarang	9,87
Universitas Negeri Surabaya	9,71
Universitas Negeri Yogyakarta	9,68
Jumlah	<b>458,3</b>

*Sumber: Laporan Keuangan LPDP Tahun 2023*

Jumlah yang telah direalisasikan ini diharapkan dapat mendukung Perguruan Tinggi di Indonesia agar menjadi Perguruan Tinggi berkelas dunia ke depannya. Dana Abadi Kebudayaan juga telah direalisasikan untuk mendukung kemajuan kebudayaan di Indonesia. Penerima layanan Dana Abadi Kebudayaan terdiri atas dukungan institusional bagi organisasi kebudayaan, pendayagunaan ruang publik, sinema mikro, dokumentasi karya atau pengetahuan maestro, penciptaan karya kreatif inovatif, kajian objek, dan *event* strategis dengan total penerima layanan pada tahun 2023 sebanyak 230 penerima dengan nilai pendanaan sebesar Rp46,35 miliar.

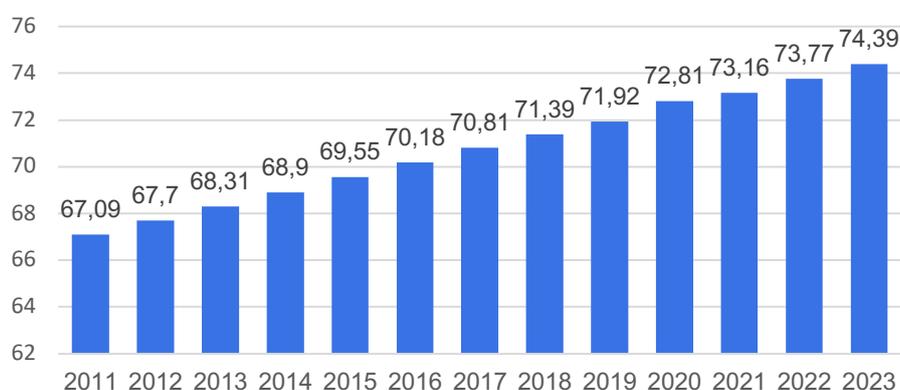
Dengan demikian, alokasi anggaran sebesar Rp20 triliun untuk Dana Abadi di

Bidang Pendidikan pada tahun 2023 telah direalisasikan seluruhnya menjadi penambah nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada LPDP, serta PNBP dari hasil investasi tersebut juga telah direalisasikan sebagai pendanaan untuk berbagai program layanan dan operasional LPDP dengan total nilai sebesar Rp9,84 triliun.

### B. Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia

Sebagai bagian dari peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia, Dana Abadi di Bidang Pendidikan tentu diharapkan menjadi salah satu katalisator untuk mempercepat peningkatan kualitas SDM di Indonesia yang nantinya akan berdampak pula pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dana Abadi di Bidang Pendidikan yang telah dikelola oleh Pemerintah menjadi layanan-layanan yang dapat diakses masyarakat diharapkan kembali menjadi perbaikan dan peningkatan kualitas SDM dan juga kualitas pendidikan. Kualitas SDM dan kualitas pendidikan ini dapat dilihat dari parameter penilaian yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index* (HDI) merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup dan tingkat perkembangan pembangunan manusia dalam jangka panjang. Angka IPM merefleksikan tingkat aksesibilitas masyarakat suatu wilayah terhadap hasil pembangunan serta dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Merujuk pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) *Audited* Tahun 2023, selama tahun 2011 hingga tahun 2023, IPM Indonesia terus mengalami perkembangan secara positif. Pada tahun 2011 IPM Indonesia sebesar 67,09. Nilai tersebut terus meningkat bahkan di saat Pandemi Covid-19 hingga tahun 2023 yang mencapai 74,39. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, IPM Indonesia tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,62 poin atau 0,84 persen dari nilai sebesar 73,77 pada 2022. Dengan pencapaian tersebut, status pembangunan Indonesia berada pada kategori tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ ). Status pembangunan pada kategori tinggi tersebut pertama kali diraih tahun 2016, di mana sebelum tahun 2016 IPM Indonesia berada pada kategori sedang ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ ). Peningkatan IPM tahun 2023 dan 2022 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dari sisi pertumbuhan, indikator penyusun dimensi pengetahuan, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan pertumbuhan tahun 2022. Sedangkan indikator pada dimensi lainnya mengalami percepatan pertumbuhan. Perkembangan Nilai IPM dari Tahun 2011 s.d. 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

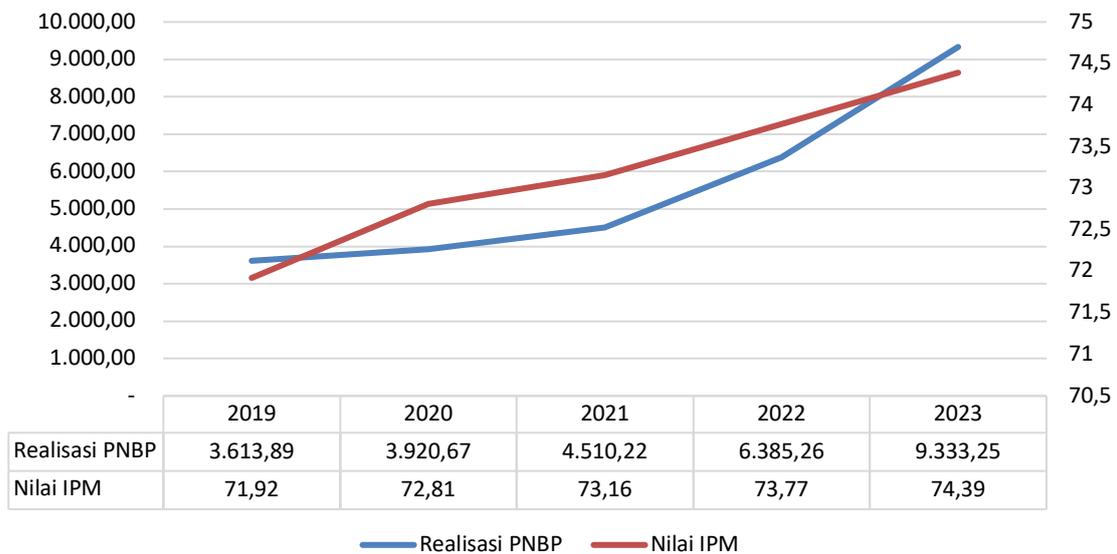


**Grafik 1. Perkembangan Nilai IPM Tahun 2011 s.d. 2023**

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024*

## Analisis Pengaruh Dana Abadi Pendidikan Terhadap Kualitas Pendidikan Dan Kualitas Sdm Di Indonesia

Dari data di atas lebih dari sepuluh tahun terakhir nilai IPM Indonesia mengalami kenaikan terus menerus. Jika kita kaitkan dengan adanya realisasi alokasi anggaran Dana Abadi di Bidang Pendidikan sejak 2011, maka kenaikan ini sejalan dengan adanya realisasi alokasi anggaran Dana Abadi di Bidang Pendidikan. Namun perlu diingat bahwa yang menjadi sumber pendanaan untuk program layanan LPDP adalah PNBP hasil dari investasi atas Dana Abadi di Bidang Pendidikan tersebut. Perbandingan antara realisasi PNBP atas investasi Dana Abadi di Bidang Pendidikan dengan nilai IPM Indonesia pada lima tahun terakhir.



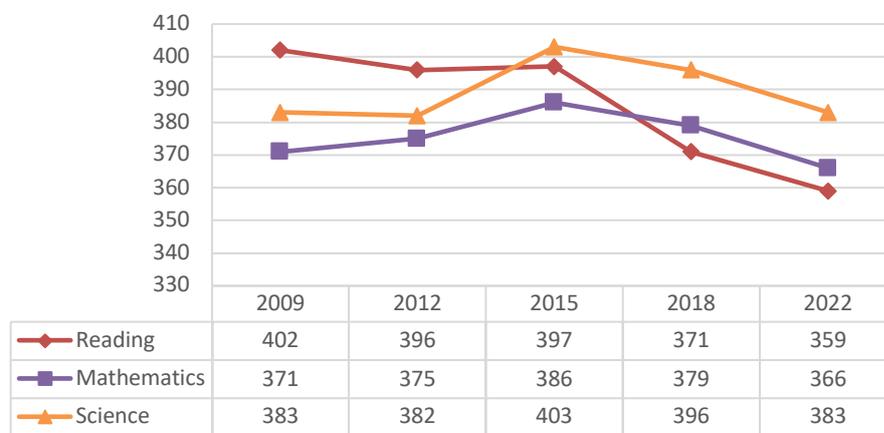
**Grafik 2. Perkembangan Nilai IPM Tahun 2020 s.d. 2023**

*Sumber: Laporan Keuangan LPDP Tahun 2023 dan Badan Pusat Statistik, diolah*

Jika dicermati, terdapat kesamaan kecenderungan pergerakan antara Nilai IPM dan Realisasi PNBP LPDP. Pada tahun 2020 saat realisasi PNBP naik 8,49 persen, nilai IPM naik sebanyak 0,89 poin dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2021, ketika realisasi PNBP naik 15,05 persen nilai IPM naik 0,35 poin dibandingkan tahun 2020. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2022 dan 2023 dimana ketika PNBP naik 41,57 dan 46,17 persen, nilai IPM naik 0,61 dan 0,62 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, jika kita lihat lebih jauh indikator-indikator pembentuk dimensi IPM yaitu Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) pada dimensi pengetahuan, dan Pengeluaran Riil Per Kapita pada dimensi standar hidup layak, secara substansi indikator-indikator ini tidak berkorelasi secara langsung dengan Dana Abadi di Bidang Pendidikan. UHH dan pengeluaran riil per kapita bukan merupakan target dan sasaran program layanan LPDP. HLS dan RLS pun yang merupakan indikator terkait pendidikan juga bukan merupakan sasaran dari program layanan Dana Abadi Pendidikan LPDP yang masih menysasar pendidikan tinggi saja, sehingga belum ada korelasi langsung secara substansi antara dimensi-dimensi pembentuk IPM dengan Dana Abadi di Bidang Pendidikan khususnya Dana Abadi Pendidikan. Dana Abadi Pendidikan seharusnya bisa berkontribusi lebih terhadap peningkatan nilai IPM melalui indikator HLS dan RLS. Pemerintah d.h.i LPDP dapat menambah program layanan baru yang berkaitan dengan pendidikan dasar dan menengah yang nantinya secara langsung dapat berpengaruh terhadap indikator HLS dan RLS sehingga akan membantu peningkatan nilai IPM Indonesia.

### C. Nilai Indonesia dalam PISA dan Peringkat Universitas di Indonesia dalam QS World Ranking

Kualitas Pendidikan Tinggi tidak bisa dipisahkan dari kualitas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah karena SDM yang akan mengisi kursi Pendidikan tinggi adalah para pelajar di Pendidikan dasar dan menengah (Hafizh Rizqullah et al., 2023; Mahmudah, 2017; Ritonga, 2018). Oleh karena itu kualitas Pendidikan tinggi tidak bisa kita pisahkan dari kualitas Pendidikan menengah. Kualitas Pendidikan dasar hingga menengah dapat kita lihat dari hasil survei PISA (*Programme for International Student Assessment*) yang dilaksanakan oleh OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*). PISA mengukur kemampuan anak usia 15 tahun dalam menggunakan keterampilan membaca, matematika, dan sains untuk menghadapi tantangan kehidupan nyata. Berdasarkan hasil PISA terakhir di tahun 2022 yang dirilis pada 5 Desember 2023, pelajar Indonesia memperoleh skor kemampuan membaca sebesar 359 poin masih jauh di bawah skor rata-rata negara anggota OECD sebesar 476 poin, skor kemampuan matematika sebesar 366 poin juga masih di bawah rata-rata sebesar 472 poin, dan skor kemampuan *science* sebesar 383 poin yang juga masih di bawah skor rata-rata sebesar 485 poin. Skor yang diperoleh Indonesia ini masih lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura yang sudah memperoleh skor di atas rata-rata negara OECD baik dalam kemampuan membaca, matematika, maupun *science*. Nilai rata-rata PISA Indonesia dalam lima Survei PISA terakhir dan perbandingan nilai PISA Indonesia dibandingkan dengan rata-rata nilai PISA negara anggota OECD dapat dilihat pada beberapa grafik berikut.



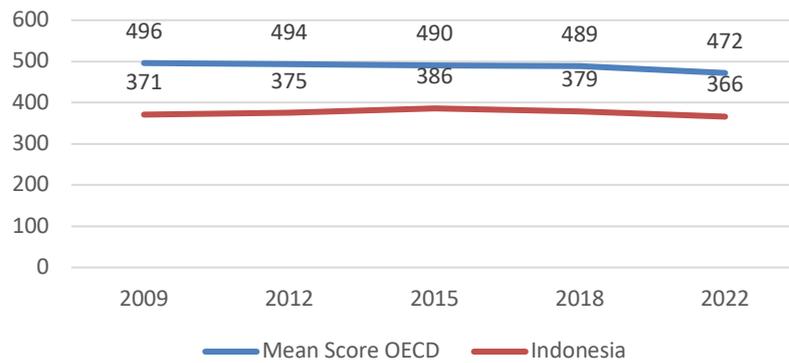
**Grafik 3. Nilai Rata-Rata PISA Indonesia Tahun 2009 s.d. 2022**

Sumber: Situs resmi OECD



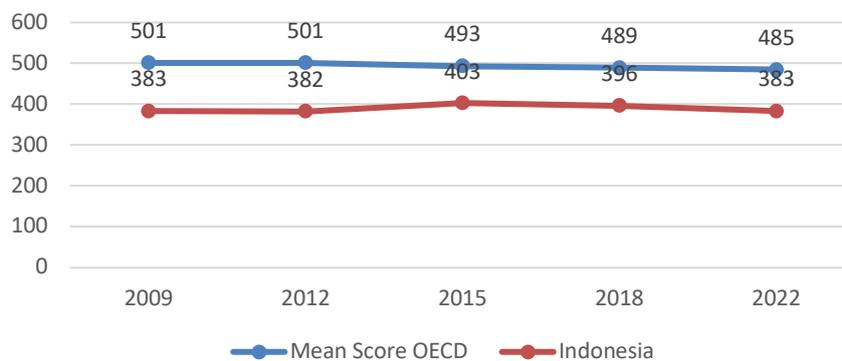
**Grafik 4. Perbandingan Rata-Rata Negara OECD dengan Indonesia pada Indikator Reading**

Sumber: Situs resmi OECD



**Grafik 5. Perbandingan Rata-Rata Negara OECD dengan Indonesia pada Indikator *Mathematics***

*Sumber: Situs resmi OECD*



**Grafik 6. Perbandingan Rata-Rata Negara OECD dengan Indonesia pada Indikator *Science***

*Sumber: Situs resmi OECD*

Nilai PISA Indonesia dalam lima survei terakhir mengalami pergerakan nilai yang fluktuatif. Nilai PISA Indonesia sempat mengalami kenaikan yang cukup baik pada tahun 2015 namun pada survei PISA tahun 2018 dan 2022 berturut-turut Indonesia mengalami penurunan nilai hingga mencapai nilai paling rendah pada survei PISA tahun 2022 dalam lima survei terakhir. Dapat pula dilihat dari grafik perbandingan nilai rata-rata negara OECD dengan Indonesia dalam lima survei terakhir, nilai PISA Indonesia belum pernah berada di atas nilai rata-rata negara OECD. Bahkan nilai PISA Indonesia berada pada poin yang cukup jauh dari rata-rata negara OECD di ketiga indikator penilaian. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih belum cukup baik dari keterampilan membaca, matematika, maupun *science*. Jika dilihat dari kacamata realisasi alokasi anggaran Dana Abadi Pendidikan serta realisasi PNBP atas dana abadi tersebut, maka dapat kita lihat belum ada korelasi antara Dana Abadi Pendidikan dengan kualitas Pendidikan Dasar dan Menengah. Hal ini sejalan dengan target penerima program layanan LPDP yang memang belum menyorot pendidikan dasar dan menengah. Hal ini sepatutnya menjadi perhatian Pemerintah mengingat realisasi alokasi anggaran dan PNBP Dana Abadi di Bidang Pendidikan cukup besar namun belum sampai menyentuh kualitas pendidikan dasar dan menengah yang menjadi awal untuk kualitas pendidikan tinggi.

Sedangkan berdasarkan hasil *QS World Ranking* Tahun 2023, beberapa universitas terbaik di Indonesia seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut Teknologi Bandung (ITB) masih berada pada peringkat 300 besar dunia,

sedangkan universitas lain masih di luar 300 besar dunia. Peringkat ini masih sangat rendah apalagi jika dibandingkan dengan National University of Singapore (NUS) di peringkat 11 dunia dan Nanyang technological University (NTU) Singapura di peringkat 19 dunia. Universitas penerima Dana Abadi Perguruan Tinggi di tahun 2023 beserta peringkatnya dalam *QS World Ranking* tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7. Peringkat Universitas Penerima Dana Abadi Perguruan Tinggi Tahun 2023**

Nama PTN BH	Jumlah DA (Rp miliar)	Peringkat 2024	Peringkat 2023	Peringkat 2022
Universitas Airlangga	82,65	345	369	465
Institut Teknologi Bandung	50,16	281	235	303
Universitas Gadjah Mada	49,69	263	231	254
Institut Pertanian Bogor	48,26	489	449	511-520
Universitas Sumatera Utara	44,55	1201-1400	1201-1400	1201-1400
Universitas Indonesia	32,37	237	248	290
Universitas Diponegoro	25,86	791-800	801-1000	1001-1200
Institut Teknologi Sepuluh November	17,86	621-630	701-750	751-800
Universitas Padjajaran	15,71	661-670	751-800	801-1000
Universitas Brawijaya	11,3	801-850	801-1000	1001-1200
Universitas Pendidikan Indonesia	10,89	1201-1400	-	-
Universitas Andalas	10,3	1401+	1201-1400	1201-1400
Universitas Syah Kuala	10,06	-	-	-
Universitas Negeri Semarang	9,87	-	-	-
Universitas Negeri Surabaya	9,71	-	-	-
Universitas Negeri Yogyakarta	9,68	1201-1400	-	-
Universitas Hasanuddin	8,66	1001-1200	1001-1200	1001-1200
Universitas Sebelas Maret	8,56	1001-1200	1001-1200	1201-1400
Universitas Negeri Padang	7,84	-	-	-
Universitas Negeri Malang	7,81	1401+	-	-

*Sumber: Situs Resmi QS World Ranking*

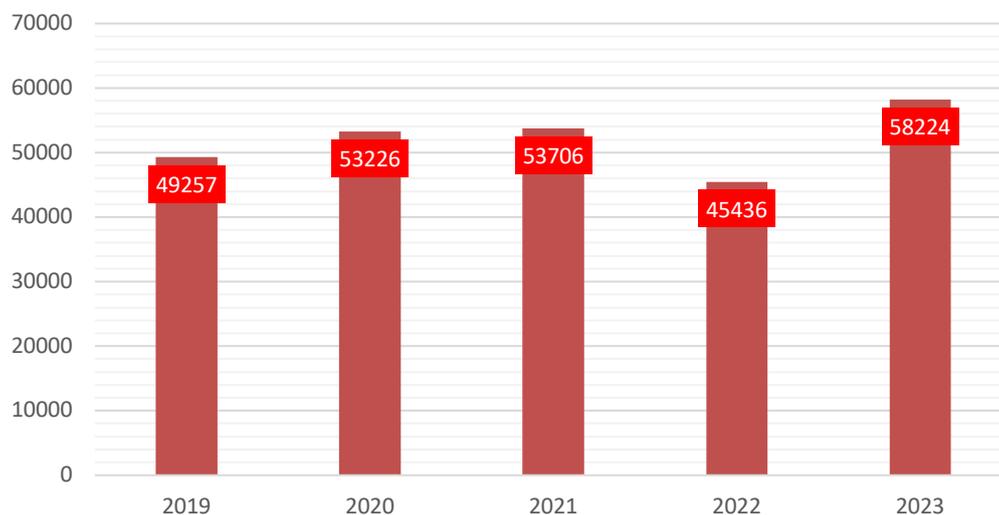
Dari data pada tabel, dapat dilihat bahwa sebanyak 45 persen atau sembilan dari 20 universitas yang menerima Dana Abadi Perguruan Tinggi pada tahun 2023 mengalami peningkatan peringkat pada tahun 2024. Sedangkan sebanyak 20 persen atau empat dari 20 universitas penerima Dana Abadi Pendidikan mengalami penurunan peringkat pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Universitas Airlangga yang menerima Dana Abadi Perguruan Tinggi terbanyak pada tahun 2024 mengalami peningkatan peringkat dari peringkat 369 pada tahun 2023 menjadi peringkat 345 pada tahun 2024. Universitas Padjajaran mengalami kenaikan peringkat yang sangat signifikan sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 dari peringkat 801-1000 menjadi peringkat 661-670 pada 2024. Hal yang sama juga terjadi pada tujuh universitas lainnya. Sedangkan Universitas Sumatera Utara, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Sebelas Maret pada tahun 2024 stagnan di peringkat yang sama dengan tahun 2023. Untuk Universitas Syah Kuala, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Negeri Padang hingga tahun 2024 belum berhasil masuk dalam peringkat *QS World Ranking*. Peringkat ini tentunya masih jauh untuk bisa mencapai paling tidak 100 besar universitas terbaik di dunia, namun peningkatan peringkat ini perlu diapresiasi sebagai bagian dari perbaikan perguruan-perguruan tinggi di Indonesia. Jika kita lihat dari realisasi Dana Abadi Perguruan Tinggi yang disalurkan kepada 20 PTN-BH maka kenaikan peringkat pada sembilan universitas mengindikasikan adanya

pengaruh dari Dana Abadi Perguruan Tinggi yang diterima oleh 20 PTN-BH penerima. PISA dan *QS World Ranking* ini harus menjadi salah satu cermin bagi Pemerintah terkait dengan kualitas pendidikan Indonesia baik pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi terlebih lagi Pemerintah telah menganggarkan *Mandatory Spending* Pendidikan setiap tahunnya.

#### D. Penelitian dan Riset di Indonesia dari Kacamata Publikasi Jurnal

Salah satu permasalahan terkait penelitian dan riset di Indonesia adalah masih rendahnya pemahaman dan minat terhadap riset, sehingga berimbas pada jumlah jurnal yang dihasilkan Indonesia dalam satu tahun. Permasalahan tersebut belum termasuk kendala kebutuhan anggaran untuk melaksanakan riset atau penelitian yang dapat menghasilkan jurnal yang berkualitas. Dalam sebuah riset diperlukan dana yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam pelaksanaan riset tersebut terutama untuk riset yang membutuhkan waktu lebih dari satu tahun. Di Indonesia alokasi dana riset masih di bawah satu persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sedangkan negara maju seperti Jepang dan Korea alokasi dana riset berada pada kisaran 3 sampai 4,5 persen dari PDB.

Berdasarkan data dari *Scimago Journal & Country Rank*, Indonesia menempati peringkat 19 dari 234 negara dengan 58.224 dokumen yang terindeks *Scopus* pada tahun 2023. Jumlah ini naik jauh dibandingkan dengan dokumen yang terindeks *Scopus* pada tahun 2022 yaitu sebanyak 45.436 dokumen dengan Indonesia berada pada peringkat 23 dari 234 negara. Sedangkan pada tahun 2021, Indonesia berada di peringkat 20 dari 235 negara dengan dokumen yang terindeks *Scopus* sebanyak 51.721 dokumen. Data jumlah dokumen Indonesia yang terindeks *Scopus* dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.



**Grafik 7. Jumlah Jurnal Indonesia Terindeks Scopus**

Sumber: *Scimago Journal and Country Rank*

Pemerintah mulai mengalokasikan Dana Abadi Penelitian pada tahun 2021. Di tahun tersebut, Pemerintah mengalokasikan Dana Abadi Penelitian sebesar Rp3 triliun, sedangkan pada tahun 2022 tidak ada alokasi dana untuk Dana Abadi Penelitian. Namun pada tahun 2021 dan 2022 tetap terdapat realisasi PNBPN atas portofolio investasi Dana Abadi Penelitian yang digunakan untuk membiayai program layanan Dana Abadi Penelitian. Jika

dibandingkan antara jumlah dokumen yang terindeks *Scopus* dengan realisasi PNBPD Dana Abadi Penelitian, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaruh antara Dana Abadi Penelitian dengan jumlah dokumen penelitian yang dihasilkan. Pada tahun-tahun sebelum dianggarkan Dana Abadi Penelitian, jumlah dokumen yang dihasilkan Indonesia selalu mengalami peningkatan hingga mencapai puncaknya pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022 saat Pemerintah sudah mengalokasikan Dana Abadi Penelitian justru terdapat penurunan yang signifikan pada jumlah dokumen yang terindeks *Scopus* sebanyak 8.270 jurnal dari 53.706 di tahun 2021 menjadi 45.436 di tahun 2022. Pada tahun 2023, jumlah dokumen yang terindeks *Scopus* kembali meningkat menjadi 58.244. Data ini mengindikasikan bahwa Dana Abadi Penelitian belum memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian di Indonesia yang dibuktikan dengan jumlah dokumen yang terindeks *Scopus*. Namun peningkatan dokumen yang terindeks *Scopus* pada tahun 2023 patut diapresiasi mengingat tujuan adanya Dana Abadi Penelitian adalah untuk mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian di Indonesia. Penurunan jumlah dokumen yang terindeks *Scopus* pada tahun 2022 merupakan penurunan pertama dalam sepuluh tahun terakhir. Tentu hal ini harus tetap menjadi perhatian Pemerintah berkaitan dengan peningkatan kualitas penelitian di Indonesia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap realisasi alokasi Dana Abadi di Bidang Pendidikan serta realisasi pendanaan untuk program layanan LPDP, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan kecenderungan pergerakan antara Nilai IPM dan Realisasi PNBPD LPDP, namun secara substansi belum ada korelasi langsung antara indikator-indikator pembentuk IPM dengan target dan program layanan LPDP. Belum ada korelasi antara Dana Abadi Pendidikan dengan kualitas Pendidikan Dasar dan Menengah, dikarenakan program layanan Dana Abadi Pendidikan belum menyoar pendidikan dasar dan menengah. Di sisi lain, terdapat kenaikan peringkat pada universitas-universitas penerima insentif Dana Abadi Perguruan Tinggi, yang mengindikasikan adanya pengaruh dari Dana Abadi Perguruan Tinggi terhadap peringkat universitas-universitas tersebut. Namun, Dana Abadi Penelitian belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari jumlah dokumen yang terindeks *Scopus* yang tidak sejalan dengan adanya Dana Abadi Penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie Hari Setiawan. (2023). Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *JAPHTN-HAN*, 2(1). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.64>
- An Nisaa' Budi Sulistyaningrum, Nurulita Artanti Nirwana, Dhiya Ratri Januar, & Nela Najwa Hilalia. (2022). Performa Kebijakan Kampus Merdeka pada Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(6). <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i6.489>
- Awulle, C. S. E. (2020). Penyelenggaraan Pendidikan Kristen Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *SIKIP: Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, 1(1). <https://doi.org/10.52220/sikip.v1i1.35>
- Aziizu, B. Y. A. (2015). Tujuan Besar Pendidikan Adalah Tindakan. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13540>
- Cahyadi, N. (2020). Pelaksanaan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang

- Disabilitas Mental Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Studi Kasus Sekolah Menengah Kejuruan Nasional Depok). *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.32493/rjih.v2i2.4426>
- Daria, D. (2022). Disharmonisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Mata Kuliah Pancasila Sebagai Mata Kuliah Wajib Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 10(1). <https://doi.org/10.33884/jck.v10i1.5518>
- Fakhrul, M. N., Abdurahim, M., Afriansyah, A., & Ubaidah, U. (2023). Kebijakan Pendidikan Nasional Pada Anak Berkebutuhan Khusus. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 3(1). <https://doi.org/10.32832/djip-uika.v3i1.8665>
- Hadiyanto, Teguh Dwi Prasetyo, Merini, D., & Yalisman, F. (2022). Indonesian Treasury Review Menakar Keefektifan Mandatory Spending Bidang Pendidikan. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 7(2).
- Hafizh Rizqullah, L., Khotibuziddan, A., Muhammad Irfan, D., & Suherman, I. (2023). Peranan Audit Operasional Pada Unit Karya Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Zaid Bin Tsabit Kota Bogor. *Tadbiruna*, 2(2). <https://doi.org/10.51192/tadbiruna.v2i2.475>
- Hairani, E. (2018). Pembelajaran Sepanjang Hayat Menuju Masyarakat Berpengetahuan. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 2(1). <https://doi.org/10.52266/tadjid.v2i1.107>
- Irawati, E., & Susetyo, W. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Di Blitar. *Jurnal Supremasi*, 7(1). <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i1.374>
- Khunaifi, A. Y., & Matlani, M. (2019). Analisis Kritis Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 13(2). <https://doi.org/10.30984/jii.v13i2.972>
- Mahmudah, H. (2017). Transmisi Ideologi Fundamentalisme Dalam Pendidikan. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 1(2). <https://doi.org/10.52266/tadjid.v1i2.45>
- Menakar Keefektifan Mandatory Spending Bidang Pendidikan. (2022). *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 7(2). <https://doi.org/10.33105/itrev.v7i2.626>
- Ode, S., & Marajohan Tambun, Y. A. (2022). Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2021 (Implementasi Program Studi Independen Bersertifikat Sekolah Ekspor). *Journal Of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah)*, 7(2). <https://doi.org/10.52447/gov.v7i2.6131>
- Ritonga, M. (2018). Politics and Policy Dynamics of Changing the Education Curriculum in Indonesia until the Reformation Period. *Bina Gogik*, 5(2).
- Thalib, N., & Haris, U. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan Di Kabupaten Merauke (Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional). *Jurnal Administrasi Karya Dharma*, 2(1 SE-Articles).
- Triningsih, A. (2017). Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi. *Jurnal Konstitusi*, 14(2). <https://doi.org/10.31078/jk1425>
- Wartoyo, F. X. (2022). Menakar Korelatifitas Merdeka Belajar Dengan Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pancasila. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 4(2).
- Wulan, P. T., & Sasmita, A. R. (2022). Analisis Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Sipil di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo. *Eksaminasi : Jurnal Hukum*, 1(1).